

BAB I **PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang Penelitian

Laporan keuangan ialah hasil dari disiplin akuntansi, sehingga sebagai wujud pertanggungjawaban, penyajian laporan keuangan wajib penuh prinsip akuntansi yang berlaku umum serta disajikan secara adil. Terbentuknya pelaporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia ialah hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Bila dilihat lebih jauh dalam penataan laporan keuangan pemerintah nyatanya masih banyak informasi yang disajikan kurang sesuai. Pengelolaan keuangan daerah ialah keseluruhan aktivitas yang meliputi perencanaan, penerapan, pelaporan dan pertanggungjawaban atas keuangan daerah, proses pengelolaan keuangan daerah yang ada dalam lembaga wajib ditata sedemikian rupa supaya menciptakan pengelolaan keuangan yang efektif. Dalam pengelolaan tersebut akan terlihat dari hasil penilaian BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) (Rahmawati, 2018).

Bersumber PP Nomor. 71 Tahun 2010 tentang SAP, basis akrual sepatutnya telah diterapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Basis akrual ialah basis akuntansi yang membetulkan tentang pengaruh transaksi serta kejadian yang terjalin tanpa mengawasi dikala kas ataupun setara kas diterima. Menurut Almumtahanah (2019) Laporan keuangan pemerintah daerah bertujuan menyajikan data posisi keuangan, anggaran dan kinerja keuangan dalam rangka merumuskan serta mengevaluasi kebijakan pengelolaan sumber dana. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sangat penting terutama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Secara umum laporan keuangan

pemerintah daerah berfungsi sebagai media informasi untuk menginformasikan kondisi keuangan suatu organisasi supaya dikenal oleh pihak yang berkepentingan dan berhak untuk itu. Melihat pentingnya laporan keuangan dalam memperhitungkan kesehatan suatu organisasi, maka laporan keuangan harus disusun secara teliti dan terbebas dari prasangka kurang baik.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) menerima evaluasi tahunan berbentuk pendapat dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Apabila BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap LKPD, berarti bisa dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah disajikan serta diungkapkan secara adil dan berkualitas. Terdapat empat pendapat yang diberikan BPK, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TW), dan Pernyataan Menolak Memberi Opini atau Opini Tidak Memberi Pendapat (TMP) (Tawaqal, 2017).

Fenomena yang terjalin pada pemerintah daerah Kabupaten Pati adalah pemerintah Kabupaten Pati untuk kesekian kalinya meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) karena dinilai mampu menyajikan laporan keuangan pada 2019 dengan capaian tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah. Pemerintah Kabupaten Pati mempertahankan opini yang telah diraih tahun sebelumnya yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas audit laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2019 (Nazaruddin, 2020).

Pemerintah Kabupaten Pati berkomitmen untuk menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, meskipun masih terdapat kelemahan dan kekurangan dalam penyusunan laporan keuangan

pemerintah daerah sehingga masih terdapat temuan yang harus ditindaklanjuti untuk perbaikan ke depannya. Penghargaan yang diterima merupakan hasil seluruh komponen pemerintah daerah beserta jajarannya yang telah berhasil menyusun laporan sesuai dengan tata kelola keuangan yang baik. (Nazaruddin, 2020). Melihat pemberitaan yang tersebar di media sosial beberapa tahun terakhir ini lumayan memprihatinkan, sebab sesungguhnya keadaan lapangan sangat berbeda kala dalam pemerintahan kabupaten Pati. Masih terdapat sekumpulan OPD ataupun unit teknisnya melaksanakan tindak pidana korupsi.

Bagi pemerintah daerah sangat penting menyiapkan laporan keuangan yang berkualitas. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah mencerminkan tertib pengelolaan keuangan pemerintah daerah, yang meliputi tertib administrasi serta kepatuhan. Salah satu indikator kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (Almumtahanah, 2019).

Faktor pertama yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah sistem informasi akuntansi, berdasarkan hasil dari penelitian sebelumnya yang dilakukan Almumtahanah (2019) menyatakan bahwa laporan keuangan dihasilkan dari suatu proses yang didasarkan pada input yang baik, proses yang baik dan output yang baik. Berdasarkan penelitian Tawaqal (2017) menyatakan bahwa variabel penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini sesuai dengan pernyataan bahwa laporan keuangan dihasilkan dari suatu proses yang baik. Untuk dapat menghasilkan informasi yang

diperlukan oleh para pembuat keputusan, sistem informasi akuntansi harus melaksanakan tugas sebagai berikut: a. mengumpulkan informasi transaksi serta data lain kemudian memasukkannya dalam sistem, b. memproses suatu data transaksi, c. menyimpan data untuk keperluan di masa yang akan datang, d. menghasilkan informasi yang diperlukan dengan memproduksi laporan, e. mengendalikan seluruh proses sedemikian rupa sehingga informasi dan data yang dihasilkan akurat dan andal (Krismiaji, 2015:4).

Faktor kedua yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah kompetensi sumber daya manusia. Menurut Lisda (2018), sumber daya manusia bisa mempengaruhi kualitas laporan keuangan karena guna menghasilkan nilai informasi menyangkut dua elemen pokok yakni informasi yang dihasilkan dan sumber daya yang menghasilkannya. Untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas dibutuhkan sumber daya manusia yang memahami dan berkompeten di bidang akuntansi pemerintah daerah. Manusia adalah unsur terpenting dalam keberhasilan organisasi dan aset organisasi yang paling penting serta wajib diperhatikan manajemen adalah sumber daya manusia.

Faktor ketiga yang mempengaruhi tingkat kualitas laporan keuangan adalah pemanfaatan teknologi informasi. Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam organisasi diharapkan menjadikan pencatatan transaksi dengan lebih cepat terutama berkaitan dengan transaksi yang jumlahnya banyak dan kompleks. Di Indonesia teknologi informasi berkembang seiring dengan peradaban manusia yang semakin modern, dalam proses

pengelolaan atau pendistribusian data dengan memanfaatkan komputer dan perangkat telekomunikasi (Hadi, 2017).

Faktor keempat adalah sistem pengendalian intern, sistem pengendalian intern berperan selaku pedoman untuk melakukan dan mengukur pengujian efektivitas, menyelenggaraan kegiatan organisasi dengan mempertimbangkan aspek biaya, manfaat, sumber daya manusia, kejelasan kriteria untuk mengukur efektivitas dan perkembangan teknologi yang dilakukan secara komprehensif (Mildamayanti, 2018). Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa pengendalian intern yang lemah menyebabkan tidak dapat terdeteksinya kecurangan atau ketidakakuratan proses akuntansi, sehingga bukti yang diperoleh dari data akuntansi menjadi tidak kompeten.

Perbedaan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Almuttaha (2019), yang berjudul “Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada PT Berkat Sinar Sentosa”, dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu peneliti menambahkan tiga variabel independen 1. Variabel kompetensi sumber daya manusia, karena sangat penting dalam mengelola dan menyajikan informasi keuangan dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidangnya sehingga laporan keuangan yang disusun dapat tepat waktu. 2. Variabel pemanfaatan teknologi informasi, karena komputer sebagai bagian dari teknologi informasi membawa perubahan bagi organisasi dalam menjalankan aktivitasnya. 3. Variabel sistem pengendalian intern, karena sistem pengendalian intern merupakan rencana organisasi atau metoda yang digunakan untuk melindungi aset, menghasilkan informasi yang

berkualitas. Perbedaan selanjutnya yaitu pada objek, jika peneliti sebelumnya oleh Almumtahanah (2019) objek penelitiannya pada PT Berkas Sinar Sentosa, maka penelitian kali ini yaitu pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Pati.

Menurut latar belakang yang telah dijelaskan tersebut, maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan mengambil judul yaitu **“Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pati)”**.

1.2 Ruang Lingkup

Untuk menghindari kesalahan dalam melakukan pembahasan, maka penelitian ini membatasi permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Variabel yang diteliti adalah variabel yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan yaitu berupa pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi, kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern.
2. Obyek pada penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Pati.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan?

2. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan?
3. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan?
4. Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, adapun tujuan penelitian yang hendak dilakukan analisis berikut ini:

1. Untuk menguji pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan.
2. Untuk menguji kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan.
3. Untuk menguji pemanfaatan teknologi informasi teknologi terhadap kualitas laporan keuangan.
4. Untuk menguji sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharap mampu memberi wawasan beberapa pihak terkait manfaat kualitas laporan keuangan antara lain:

1. Bagi Organisasi Perangkat Daerah

Bagi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pati hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam pelaksanaan otonomi daerah khususnya laporan keuangan.

2. Bagi masyarakat

Bagi masyarakat diharapkan menjadi penilaian atau pengevaluasian untuk menilai bahwa pengelolaan dana desa telah akuntabel.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini nantinya dapat meningkatkan dan memperluas pengetahuan serta wawasan mengenai masalah yang diteliti, sehingga dapat diperoleh gambaran yang luas dan jelas mengenai kesesuaian fakta lapangan dengan teori yang ada.

